

**SKRIPSI**



**PELANGGARAN HUKUM NASIONAL INDONESIA YANG DILAKUKAN  
OLEH PENGUNGSI YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA  
(SUATU TINJAUAN HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL)**

**OLEH :**

**MULHADI HM**

**B 111 10 395**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2014**

**HALAMAN JUDUL**

**PELANGGARAN HUKUM NASIONAL INDONESIA YANG DILAKUKAN  
OLEH PENGUNGSI YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA  
(SUATU TINJAUAN HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL)**

**OLEH  
MULHADI HM  
B111 10 395**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Bagian Hukum Internasional  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **PELANGGARAN HUKUM NASIONAL INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH PENGUNGSI YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA (SUATU TINJAUAN HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

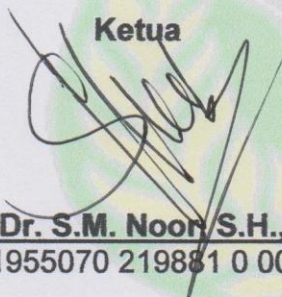
**MULHADI HM**

**B111 10 395**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Selasa tanggal 06 Juni 2014 dan Dinyatakan Diterima

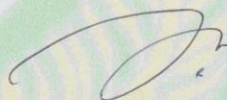
#### **Panitia Ujian**

**Ketua**



**Prof. Dr. S.M. Noor S.H., M.H.**  
NIP. 1955070 219881 0 001

**Sekretaris**



**Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A.**  
NIP. 19770120 200112 2 001

**A.n. Dekan**

**Wakil Dekan Bidang Akademik**



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

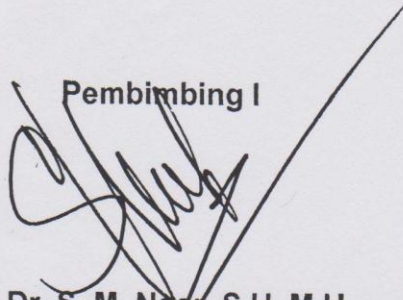
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : MULHADI HM  
Nomor Induk : B 111 10 395  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul : PELANGGARAN HUKUM NASIONAL INDONESIA  
YANG DILAKUKAN OLEH PENGUNGSI YANG  
BERADA DI WILAYAH INDONESIA  
(Suatu Tinjauan Hukum Pengungsi Internasional)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, 13 Mei 2014

Pembimbing I



Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H.  
NIP. 1955070 210881 0 001

Pembimbing II



Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.  
NIP. 19770120 200112 2 001



## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MULHADI HM.

No. Pokok : B111 10 395

Bagian : Hukum Internasional

Judul Skripsi : Pelanggaran Hukum Nasional Indonesia yang Dialkukan oleh Pengungsi (Suatu Tinjauan Hukum Pengungsi Internasional)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2014



Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

## ABSTRAK

**Mulhadi HM (B11110395), Pelanggaran Hukum Nasional Indonesia yang dilakukan oleh Pengungsi yang Berada Di Wilayah Indonesia (Suatu Tinjauan Hukum Pengungsi Internasional). Di bimbing oleh S.M. Noor selaku pembimbing I dan lin Karita Sakharina selaku pembimbing II.**

Masalah pengungsi telah menjadi isu internasional yang harus segera ditangani karena jumlahnya terus meningkat setiap tahun dan perilaku pengungsi yang seringkali menimbulkan masalah. Urgensi penanganan pengungsi khususnya di Indonesia menjadi semakin penting karena hal ini berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan Warga Negara Indonesia sendiri. Sehingga perlu adanya peraturan khusus mengenai perlakuan pengungsi di wilayah Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk memberi kontribusi terhadap penyelesaian masalah pelanggaran hukum nasional Indonesia yang dilakukan oleh pengungsi yang berada di wilayah Indonesia sehingga pemerintah Indonesia memiliki referensi tambahan dalam menyelesaikan masalah pengungsi, juga untuk memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pengungsi internasional.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara, baik langsung maupun melalui media elektronik seperti email dan lain-lain. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian dalam skripsi ini antara lain berupa buku, jurnal, dokumen-dokumen, artikel dan karya-karya tulis dalam bentuk media cetak dan media internet.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengungsi yang berada di wilayah Indonesia seperti merusak fasilitas pengungsi, perkeltahan hingga pemerkosaan. Hal ini menimbulkan keresahan terhadap warga dimana pengungsi itu berada. Dalam menyelesaikan masalah ini, pemerintah Indonesia menggunakan hukum nasional yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 2 Konvensi 1951.

Kata Kunci: Pengungsi, Pelanggaran, Hukum Pengungsi Internasional

## **ABSTRACT**

**Mulhadi HM (B11110395), Indonesian National Law Violations committed by refugees in Indonesia Region (A Review of International Refugee Law). Guided by S.M. Noor and lin Karita Sakharina.**

Problem has become an international issue that must be addressed as the numbers continue to increase every year and behaviors that often cause problems of refugees. Urgency handling of refugees, especially in Indonesia is becoming increasingly important as it relates to the safety and welfare of the citizens of Indonesia itself. So the need for special rules regarding the treatment of refugees in Indonesia.

This research aims to contribute to the settlement of the Indonesian national law violations committed by refugees residing in the territory of Indonesia so that Indonesian government has an additional reference in resolving the problem of refugees, as well as to contribute to the development of the science of international refugee law.

The method used in this paper is Field Research (Field Research) and Research Library (Library Research). Fieldwork was conducted by interview, either directly or through electronic media such as email and others. While library research done by studying and analyzing a wide variety of reading materials related to the object of study in this paper which include books, journals, documents, articles and writings in the form of print and Internet media.

Based on the results of research showed that there have been various types of offenses committed by refugees in Indonesia such as destroying refugees, fights to rape. This raises concerns about which the residents are refugees. In resolving this issue, the Indonesian government uses national laws in force in Indonesia as defined in article 2 of the 1951 Convention.

**Keywords :** Refugees, Violations, International Refugee Law

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis serta salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad Saw yang menjadi tauladan. Alhamdulillah rabbil'alam, berkat karunia Allah SWT Penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **“Pelanggaran Hukum Nasional Indonesia yang dilakukan oleh Pengungsi yang Berada di Wilayah Indonesia (Suatu Tinjauan Hukum Pengungsi Internasional)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk menyelesaikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.



Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada ayah H.Mappiasse dan Ibu Hj.Dahra yang senantiasa merawat, mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada kakak-kakak penulis, Bripka Mas Udin, Sertu Masyadi, Amd.Kep., Mar Ati, S.Farm.,Apt. Kepada Adik penulis Darniati yang setiap saat mengisi hari-hari penulis dengan penuh kebersamaan, canda dan tawa.

Terima kasih penulis haturkan pula kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
2. Seluruh dosen di Fakultas Hukum UNHAS yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Achmad, S.H.,M.H. selaku Penasihat Akademik atas waktu dan nasihat yang dicurahkan kepada penulis;
4. Bapak Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

6. Dewan Penguji, Ibu Prof. Dr. Ny. Alma Manuputty, S.H.,M.H., Ibu Inneke Lihawa, S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Marthen Napang, S.H.,M.H. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
7. Kanda Kadarudin, S.H.,M.H.,DFM. yang sudah seperti pembimbing III yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Dosen-dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNHAS Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H.,M.H., Bapak Prof. Dr. Hamid Awaluddin, S.H.,M.H.,LLM., Bapak Prof. Dr. Muhammad Asri, S.H.,M.H., Bapak Dr. Maasba Magassing, S.H.,M.H., Bapak Dr. Judhariksawan, S.H.,M.H., Bapak Dr. Marcell Hendrapati, S.H.,M.H., Bapak Laode Syarif, S.H.,LLM.,Ph.D., Bapak Dr. Laode Abdul Gani, S.H.,M.H., Bapak Maskun, S.H.,LLM., Bapak Albert Lakollo, S.H.,M.H., Ibu Birkah Latif, S.H.,M.H.,LLM., dan Ibu Trifenny, S.H.,M.H. atas segala pelajaran dan pengetahuan yang diberikan selama menempuh pendidikan;
9. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum UNHAS yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan;
10. Ibu Mitra selaku Kepala Bagian Informasi UNHCR Jakarta yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini;

11. Ibu Masniati, S.H. selaku Kepala Seksi Administrasi dan Registrasi Rumah Detensi Imigrasi Makassar yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini;
12. Keluarga besar bibi St. Rahma, sepupu Akmal, kakak ipar A. Sumarni Nur, S.Si. yang selama ini menyemangati penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan keponakan A. Faiz Dzafran yang telah hadir memberikan warna baru dalam kehidupan penulis;
13. Sahabat-sahabatku Darwin, Irsan, Dayat, Haidir, Salam, Surya, Imran, Dio dan Ahmad Nur atas kebersamaan dan pelajaran hidup yang kalian berikan;
14. Senior/alumni UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum UNHAS kak Abi, kak Ancu, kak Shawir, kak Nia, kak Madong, kak Indry, kak Okky, kak Opu, kak Arif, kak Cua', kak Ica, kak Indra, kak Bon, kak Isak, kak Edwin, kak Upi, kak Fandy, kak Asdar dan kak Danil atas canda, kasih sayang dan hinaan yang dilontarkan;
15. DPO, teman-teman dan adik-adik di UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum UNHAS Gun, Icmi, Irfan, Asma, Ikram, Yenni, angki, Fitrah, Fitri, Maryam, Ati, Ical, Joe, Mamet, Ikram Jr, Haedar, Anti, Kiki, Gustia, Nini, Unhii, Cindra, Zul, Riska, Amri, Yudi, Ridwan dan lainnya yang sempat disebutkan atas segala bantuan dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis selama ini;

16. Senior, teman-teman dan adik-adik di UKM Mahasiswa Pencinta Mushallah (MPM) Asy Syariah Fakultas Hukum UNHAS kak Rahman, kak Afif, Kahfi, Imam, Fachri, Yarham, Wahyu, Asyraf, Aswal atas segala nasehat tentang kehidupan dunia dan akhirat yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
17. Senior, teman-teman dan adik-adik di UKM Karatedo Gojukai Fakultas Hukum UNHAS kak Adi, kak Mami, Bani, Fikar, Donita, Rian, Nita, Afli, Nila, Rida, Innah, Mullis, Isra, Andra, Fachri, Putra, Amma atas segala motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
18. Senior, teman-teman dan adik-adik di International Law Student Assosiation (ILSA) kak Kyo, kak Iona, kak Sabri, kak Dio, kak Mikel, kak Faris, kak Dede, Rafika, Ulfa, Fina, Riyad, Alin, Waode, Zul, Aril, Mumu, Dini, Rini, Ila, Feny dan lainnya atas segala bantuan dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
19. Senior dan teman-teman Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB) kak Fajar, kak Didit, kak Oda, kak Ari, kak Allu, kak, Ahyar, kak Amel, kak Alya, kak Ita, Fachrul, Feby, Sasa, Fian, Opul, Iccang, Syahrul, Tari, Angga, Amran dan lainnya atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini;
20. Teman-teman WB (Wasabby Brotherhood) Anto, Adi, Anca, Afil, Hatir, Adiyat, Reza, Fakhry, Fai, Rio, Azwad, Hadi, Rizal, Wawan, Riza, Dila, Wadje, Tri, Buja, dan Feby atas segala kebersamaan dalam suka dan duka;

21. Teman-teman LEGITIMASI 2010 yang tidak sempat disebutkan satu per satu;
22. Teman-teman KKN Gel. 85 UNHAS-UNAND Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, kak Anca, kak Mus, kak Ardy, kak Taslim, kak Glen, kak Rusdin, kak Dede, kak Diah, kak, Syane, kak Yaumil, kak Peri, Andri, Cummank, Tuty, Rika, Sahe, Kiki, Firman, Yaya, Indah, Anmar, Iman, Sahlan, Opin, Itty, Tary, Dede, Billy, Rendy, Emil, Fikri, Icha, Ida, Ihsan, Ratna, Enceng, Wira, Anca, Ila, Melati, Arid, Elvi, Nurul, Ririn, dan Santi atas pengalaman baru yang diberikan kepada penulis;
23. Teman-teman Apartemen Pelangi, kak Besse, Adnin, Dian, Eri, dan kak Titin atas keramahan dan kebersamaan yang penuh canda selama ini;
24. Teman-teman Akper Pelamonia Andes, Mono, Jamal, Sertu Nawir, Sertu Albar, Serda Didit, Ikbal, Taruk, Sertu Rizal, Sertu Husni, Sertu Samsul, Ade, dan Serda Yuda atas segala kebersamaan dan kekonyolan yang dilakukan selama ini;
25. Teman-teman Bis Besar dan Sporting DIUS beserta para penggemarnya;
26. Teman-teman IKAMI SUL-SEL di Jakarta kak Tadir, kak Ari, Muaz, kak Naufal, kak Ono, dan om Albar atas keramahan dan bantuan kepada penulis selama penelitian di Jakarta;

27. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu, terkhusus kepada wanita-wanita yang pernah mengisi kekosongan hati penulis.

Makassar, 26 Mei 2014

Mulhadi HM



## DAFTAR SINGKATAN

CAT	: <i>The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i>
DIAC	: <i>Departement of Immigration and Citizenship</i>
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DUHAM	: Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICESCR	: <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
ICRC	: <i>International Committe for the Red Cross</i>
IDP's	: <i>Internal Displace Persons</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Pengenal
Kovenan Ekosob	: Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kovenan Sipol : Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

OAU : *Organization Africa Union*

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

POLRI : Kepolisian Republik Indonesia

RUDENIM : Rumah Detensi Imigrasi

UDHR : *Universal Declaration of Human Rights*

UNHCR : *United Nations High Commission for Refugees*

UUD RI 1945: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan .....	7
D. Kegunaan Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian dan Peristilahan Pengungsi Internasional .....	9
B. Instrumen Internasional Perlindungan Pengungsi .....	12
1. Hukum Pengungsi Internasional .....	12
2. Perlindungan HAM Pengungsi .....	19
C. Kewajiban dan Hak-hak Pengungsi .....	28
1. Kewajiban Pengungsi .....	28

2. Hak-hak Pengungsi .....	29
D. Instrumen Hukum Nasional Sebagai Standar Perlakuan Pengungsi di Indonesia .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Lokasi penelitian .....	37
B. Jenis dan Sumber Data .....	37
C. Teknik Pengumpulan Data .....	38
D. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Bentuk Pelanggaran Hukum Nasional Indonesia yang Dilakukan Oleh Pengungsi yang Berada di Wilayah Indonesia .....	39
1. Bentuk-bentuk Pelanggaran .....	47
2. Penyebab Terjadinya Pelanggaran .....	47
B. Bentuk Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Hukum Nasional Indonesia yang Dilakukan Oleh Pengungsi yang Berada di Wilayah Indonesia .....	49
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	53
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian .....	53
3. Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297,	

tanggal 20 September 2002, Perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi .....	54
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	55
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	58
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah pengungsi dan perpindahan penduduk di dalam negeri merupakan persoalan yang paling sulit dihadapi masyarakat dunia saat ini. Banyak diskusi tengah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) yang terus berusaha mencari cara-cara lebih efektif untuk melindungi dan membantu kelompok yang sangat rentan ini.<sup>1</sup>

Hukum Pengungsi Internasional memiliki keterkaitan yang erat dengan Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, sebab cabang-cabang ilmu tersebut sama-sama mengkaji tentang perlindungan manusia dalam situasi-situasi yang khusus seperti pertikaian senjata dan kerusuhan. Hukum pengungsi internasional secara khusus membahas tentang perlindungan terhadap para pencari suaka dan orang-orang yang telah ditetapkan statusnya sebagai pengungsi.<sup>2</sup> Situasi pengungsi telah menjadi contoh sifat saling ketergantungan masyarakat internasional, hal ini dibuktikan dengan persoalan

---

<sup>1</sup> Muhammad Chairul Kadar, *Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Prinsip Non-refoulment, Studi Kasus Rumah Detensi Imigrasi Makassar Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan* (skripsi). Makassar: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2011, hlm. 1

<sup>2</sup> Achmad Romsan dkk, *Pengantar hukum Pengungsi Internasional*, (Bandung: Sanic Offset, 2003), hlm. 85



pengungsi satu negara dapat membawa akibat langsung terhadap negara lainnya.<sup>3</sup>

Hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antar negara.<sup>4</sup> Saling membutuhkan antara bangsa-bangsa di berbagai lapangan kehidupan yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus menerus antara bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan demikian.<sup>5</sup> Karena kebutuhan antara bangsa-bangsa timbal balik sifatnya, kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan-hubungan yang bermanfaat demikian merupakan suatu kepentingan bersama. Karena itu, untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional demikian dibutuhkan hukum untuk menjamin unsur kepastian yang sangat diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur.<sup>6</sup>

Pada tahun 1951, PBB membentuk konvensi tentang status pengungsi yang dinyatakan berlaku pada tanggal 14 april 1954. Untuk mendukung pelaksanaan konvensi ini, PBB mempunyai badan khusus yang bernama Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi atau *United*

---

<sup>3</sup> Kadarudin. *Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka, dan Pengungsi*. Makassar: Jurnal pengembangan ilmu hukum "Gratia" Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Vol. VIII, Nomor 1 Edisi April 2012, hlm. 103

<sup>4</sup> Sefriani. *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012, hlm. 3; Lihat juga John O'Brien. *International Law*. Cavendish Publishing Limited. Great Britain. 2001, hlm. 1

<sup>5</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra,. *Hukum Internasional, Bunga Rampai*. Bandung: Alumni. 2003, hlm. 105

<sup>6</sup> *Ibid.*; Lihat juga Mochtar Kusumatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni. 2003, hlm. 117

*Nations High Commission for Refugees* (selanjutnya disingkat UNHCR) yang mempunyai tugas mengawasi dan mengatur perlindungan melalui kerjasama dengan negara-negara sebagaimana diatur dalam konvensi tentang status pengungsi.<sup>7</sup>

Namun perlu diketahui bahwa UNHCR memberikan perlindungan dan bantuan tidak hanya kepada pengungsi, tetapi juga ada kategori lainnya dari yang kehilangan tempat tinggal atau orang-orang yang membutuhkan bantuan, yaitu termasuk pencari suaka.<sup>8</sup> Kerjasama masyarakat internasional<sup>9</sup> merupakan unsur terpenting bagi penyelesaian masalah pengungsi secara komprehensif.

Konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekankan pada usaha pengembangan instrumen hukum internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum internasional, khusus yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas perjalanan.<sup>10</sup>

Perlindungan pengungsi tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan penderitaan melainkan juga menjamin terlindunginya hak

---

<sup>7</sup> Lembar disposisi Direktur HAM dan Kemanusiaan, 2010, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Pengungsi*, (Jakarta: Direktorat Kerjasama HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), hlm. 1

<sup>8</sup> UNHCR. *Pengungsi Dalam Angka*, hlm. 6

<sup>9</sup> Lihat lebih lanjut dalam buku Alma Manuputty, dkk. *Hukum Internasional*. Depok: Rech-ta, 2008, hlm. 9

<sup>10</sup> Achmad Romsan dkk, *Op.Cit.*, hlm. 38

dan kebebasan asasinya yang paling diperlukan sesuai dengan kondisi khususnya, termasuk jaminan untuk dikembalikan ke wilayah tempat ia menghadapi ancaman persekusi karena alasan ras, agama, rumpun bangsa, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya.<sup>11</sup>

Pengungsi yang meninggalkan tempat asalnya disebabkan oleh berbagai macam faktor yang biasanya karena hal-hal yang dapat membahayakan nyawa pengungsi tersebut apabila masih menetap wilayah asalnya seperti perang atau penganiayaan. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, bahkan sering kali pemerintahnya sendiri yang mengancam akan menganiaya mereka. Hal tersebut sama dengan memberi keputusan mati bagi mereka hidup sengsara di dalam bayangan kehidupan tanpa adanya sarana hidup dan tanpa adanya hak bagi mereka, jika negara lain tidak mau menerima mereka, dan tidak menolong mereka setelah masuk ke negaranya.<sup>12</sup>

Sebagai negara yang mempunyai posisi geografis yang sangat strategis membuat Indonesia harus menerima konsekuensi sebagai wilayah yang terbuka dengan dunia luar khususnya yang berbatasan dengan negara terdekat. Salah satu konsekuensinya adalah adanya dampak konflik, peperangan, atau kekalutan sosial ekonomi yang

---

<sup>11</sup> Irsan Koesparmono, *Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2007), hlm. 3

<sup>12</sup> UNHCR. 2007. *Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR*. Switzerland: Media Relation and Public UNHCR, hlm. 7

dialami oleh suatu negara lain baik yang berbatasan maupun yang tidak berbatasan. Dampak tersebut berupa masuknya ribuan pencari suaka atau yang biasa disebut *asylum seeker* yang ingin mendapatkan status pengungsi. Mereka masuk melalui beberapa perbatasan di wilayah Indonesia, dan Indonesia dijadikan sebagai negara transit sebelum mereka ditempatkan di tujuan akhirnya yakni Australia misalnya.<sup>13</sup>

Indonesia<sup>14</sup> sebagai negara transit telah melaksanakan berbagai upaya dalam hal penanganan pengungsi yang lebih baik, misalnya meratifikasi berbagai instrumen Hak Asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) internasional. Selain itu juga menghasilkan instrumen HAM nasional. Upaya-upaya tersebut tidak lain sebagai komitmen Indonesia untuk menegakkan HAM. Hal ini dilakukan oleh Indonesia sebagai anggota PBB yang secara moral ikut bertanggung jawab melaksanakan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat DUHAM). Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan

---

<sup>13</sup> Lembar disposisi Direktorat Keamanan Diplomatik, 2010, *Illegal Migrant*, Jakarta: Direktorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri, hlm. 2

<sup>14</sup> Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

negara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.<sup>15</sup>

Indonesia adalah salah satu negara yang belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi, serta belum ada peraturan hukum nasional yang secara khusus mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Indonesia tidak termasuk dalam negara pihak konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967, namun Indonesia secara langsung tidak berkewajiban atas penanganan pengungsi yang ada di wilayah Indonesia. Dalam hal ini UNHCR-lah sebagai komisi tinggi di PBB untuk urusan pengungsi yang memiliki kewenangan untuk mengurus pengungsi di Indonesia.<sup>16</sup>

Masalah klasik yang hingga saat ini masih terus terulang adalah perilaku pengungsi di negara transit, yakni pelanggaran-pelanggaran yang tergolong sebagai tindak pidana dan melanggar hukum nasional negara tempat dimana ia berada. Salah satu contoh terhadap masalah tersebut adalah ketika pada tahun 2009 beberapa pengungsi Rohingya<sup>17</sup> yang ada di Aceh dipindahkan ke Medan oleh UNHCR dikarenakan pengungsi tersebut melakukan tindakan kriminal seperti

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Eny Suprpto, *Permasalahan seputar Pengungsi dan IDP's*, (<http://sekitarkita.com/2002/08/permasalahan-seputar-pengungsi-dan-idps-/2009-komunitassekitarkita>) Diakses tanggal 14 Nopember 2013 pukul 15.00 WITA.

<sup>17</sup> Rohingya adalah pengungsi asal Myanmar dan Bangladesh yang transit di Indonesia dengan tujuan akhir ke Australia.

pencurian, dan pengrusakan fasilitas umum di tempat pengungsian di Aceh.<sup>18</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hukum nasional Indonesia yang dilakukan oleh pengungsi yang berada di wilayah Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran hukum nasional Indonesia yang dilakukan oleh pengungsi yang berada di wilayah Indonesia?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum nasional Indonesia yang dilakukan oleh pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran hukum nasional Indonesia yang dilakukan oleh pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.

---

<sup>18</sup> Lihat lebih lanjut tulisan Kadarudin, *Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Menurut Konvensi 1951*. Makassar: Jurnal Hukum Internasional "Jurisdictionary", Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Vol. VI, Nomor 1 Edisi Juni 2010, hlm. 123



#### **D. Kegunaan Penulisan**

1. Memberi kontribusi terhadap penyelesaian masalah pelanggaran hukum nasional Indonesia yang dilakukan oleh pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.
2. Memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pengungsi internasional.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### E. Pengertian dan Peristilahan Pengungsi Internasional

Pengungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi. Sedangkan akar kata dari pengungsi adalah “ungsi” dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman).<sup>19</sup>

Pengungsi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *refugee*. Istilah pengungsi dalam penggunaan sehari-hari mempunyai arti yang lebih luas yaitu seseorang yang dalam pelarian yang berusaha melarikan diri dari kondisi yang dalam tidak bisa ditolerir. Tujuan dari pelarian ini adalah untuk mendapatkan kebebasan dan rasa aman. Alasan seseorang melakukan pelarian ini bisa saja disebabkan karena penindasan, ancaman keselamatan jiwanya, penuntutan, kemiskinan, perang atau bencana alam.<sup>20</sup>

Definisi pengungsi dalam perangkat internasional, itu tertuang dalam Konvensi 1951, Konvensi OAU (*Organization Africa Union*), Deklarasi Cartagena Amerika Latin 1984 (*The Latin America Cartagena*

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

<sup>20</sup> Guy S Godwin-Grill, *The Refugee in International Law, Second Edition*, (Great Britain: Clarendon Press-Oxford, 1966), hlm. 3.

*Declaration*),<sup>21</sup> serta organ khusus PBB yang mengurus pengungsi UNHCR. Definisi pengungsi yang utama terdapat dalam Konvensi 1951, dan di dalam Konvensi tersebut definisi pengungsi<sup>22</sup> terdiri dari :

- a. Pasal penyertaan, menentukan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seorang individu dapat dianggap pengungsi. Pasal-pasal ini merupakan dasar penentuan apakah seseorang layak diberi status pengungsi.

Di dalam pasal penyertaan ini diatur bahwa untuk memperoleh status pengungsi, seseorang harus mempunyai ketakutan yang beralasan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya, berada di luar negara kebangsaannya/bekas tempat menetapnya, dan tidak dapat atau ingin dikarenakan ketakutannya itu, memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.

- b. Pasal pengecualian, menolak pemberian status pengungsi kepada seseorang yang memnuhi syarat pada pasal penyertaan atas dasar orang tersebut tidak memerlukan atau tidak berhak mendapatkan perlindungan internasional.

Di dalam pasal pengecualian ini, diatur bahwa walaupun kriteria pasal penyertaan seperti yang telah dijelaskan di atas terpenuhi, permohonan status pengungsi seseorang akan ditolak jika ia menerima perlindungan atau bantuan dari lembaga PBB selain UNHCR, atau diperlakukan sebagai sesama warga di negara tempatnya menetap dan melakukan pelanggaran yang serius sehingga ia tidak berhak menerima status pengungsi.

- c. Pasal pemberhentian, menerangkan kondisi-kondisi yang mengakhiri status pengungsi karena tidak lagi diperlukan atau dibenarkan.

Di dalam pasal ini, diatur bahwa konvensi juga menjabarkan keadaan-keadaan yang menghentikan status kepengungsian seseorang karena sudah tidak lagi diperlukan atau tidak dapat dibenarkan lagi karena tindakan sukarela dari pihak

---

<sup>21</sup> UNHCR. 2007. *The 1951 Refugee Convention Question & Answers.*, hlm. 5

<sup>22</sup> UNHCR. 2005. *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR.* Switzerland: Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi., hlm. 53

individu, atau perubahan fundamental pada keadaan di negara asal pengungsi.

Sedangkan definisi pengungsi dari Konvensi Pengungsi OAU ini muncul dari pengalaman perang kemerdekaan di Afrika, dan pada tahun 1965 dibentuklah *Commission on Refugees* di Afrika.<sup>23</sup> Menurut Konvensi Pengungsi OAU, memberikan definisi pengungsi sebagai berikut :

“Seorang pengungsi adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena agresi di luar, pendudukan, dominasi asing atau kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban umum secara serius di salah satu bagian atau di seluruh negara asal atau negara kebangsaan”.<sup>24</sup>

Definisi lain mengenai pengungsi juga terdapat di dalam Deklarasi Kartagena, walaupun bagian dari definisi ini jelas dipengaruhi oleh Konvensi Pengungsi OAU serta mencerminkan sejarah kepengungsian massal akibat perang sipil di negara-negara Amerika. Sementara deklarasi tersebut tidak mengikat secara hukum, prinsip-prinsip, termasuk definisi pengungsi telah dimasukkan ke dalam hukum nasional dan pelaksanaan negara-negara Amerika Tengah dan Latin. Dalam Deklarasi Kartagena, definisi pengungsi sebagai berikut :

“Pengungsi jika mereka meninggalkan negaranya karena hidup, keselamatan atau kebebasannya telah terancam oleh kekerasan umum, agresi asing, konflik dalam negeri, pelanggaran berat atas hak asasi manusia atau keadaan-keadaan lain yang mungkin mengganggu ketertiban umum secara serius”.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> D. W. Bowett. 2007. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 306

<sup>24</sup> UNHCR. 2005., *Op.Cit.*, hlm. 58

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 59

Selain definisi yang telah dijelaskan di atas, Organ Khusus PBB yang mengurus pengungsi yakni UNHCR juga memberikan definisi pengungsi sebagai berikut :

“Seorang pengungsi adalah seseorang yang memenuhi kriteria/definisi pengungsi Konvensi 1951, serta berada di luar negara asalnya atau tempat menetapnya dan tidak dapat kembali ke sana karena ancaman yang serius dan tanpa pandang bulu terhadap hidupnya, integritas fisik atau kebebasannya dikarenakan kekerasan umum, atau kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban umum secara serius”.<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi-definisi pengungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis juga memberikan definisi bahwa pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan negara asalnya karena adanya ancaman terhadap kelangsungan hidupnya kemudian mencari kehidupan yang lebih baik. Perlu ditekankan bahwa yang dimaksud dengan pengungsi dalam tulisan ini adalah pengungsi internasional menurut atau berdasarkan Konvensi 1951.

## **F. Instrumen Internasional Perlindungan Pengungsi**

### **1. Hukum Pengungsi Internasional**

Hukum pengungsi internasional atau biasa disebut dengan hukum pengungsi lahir bersamaan dengan disahkannya Konvensi 1951. Secara umum dapat dikatakan bahwa Hukum Pengungsi Internasional adalah sekumpulan peraturan yang diwujudkan dalam beberapa instrumen-instrumen internasional dan regional yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 64

mengatur tentang standar baku perlakuan terhadap para pengungsi. Instrumen-instrumen internasional yang dimaksud dalam definisi di atas, yaitu konvensi 1951, Protokol 1967, dan instrumen lain yang memiliki daya laku internasional serta instrumen regional tentang pengungsi seperti Afrika, Eropa, dan Amerika Latin.<sup>27</sup>

a. Konvensi Pengungsi 1951

Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal penting dan resmi serta bersifat multilateral.<sup>28</sup> Konvensi 1951 merupakan titik awal dari setiap pembahasan mengenai hukum pengungsi internasional, konvensi ini merupakan salah satu dari dua perangkat pengungsi universal. Konvensi ini dianggap sebagai pembuka jalan, terutama karena pertama kali dalam sejarah sebuah konvensi telah memberikan definisi umum seorang pengungsi.<sup>29</sup>

Secara garis besar konvensi 1951 terdiri dari 64 pasal dan 7 bab, merupakan perjanjian internasional bersifat multilateral yang memuat tentang prinsip-prinsip penting hukum internasional.<sup>30</sup> Konvensi tersebut merupakan instrumen yang bertujuan

---

<sup>27</sup> Achmad Romsan dkk, *Op.Cit.*, hlm. 86.

<sup>28</sup> Damos Dumoli Agusman. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 33

<sup>29</sup> UNHCR. 2005., *Op.Cit.*, hlm. 24

<sup>30</sup> Achmad Romsan Dkk, *Op.Cit.*, hlm. 87

melindungi orang-perorangan berkaitan dengan keadaannya di dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Salah satu dari inti konvensi ini adalah prinsip *non-refoulment* yang melarang dipulangkannya seorang pengungsi dalam keadaan apapun ke negara atau wilayah dimana kelangsungan atau kebebasan, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.<sup>32</sup> Prinsip *non-refoulement* merupakan salah satu prinsip-prinsip hukum umum yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional<sup>33</sup> (Konvensi 1951). Prinsip ini juga termasuk prinsip yang tidak dapat diubah (*peremptory*) dan tidak boleh diabaikan.<sup>34</sup> Serta bersifat fundamental yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.<sup>35</sup>

Secara tegas, konvensi menyatakan bahwa:<sup>36</sup>

- 1) Perlindungan harus diberikan kepada semua pengungsi tanpa membedakan.
- 2) Standar minimum perlakuan harus diperhatikan sehubungan dengan pengungsi yang juga mempunyai kewajiban-

---

<sup>31</sup> Lihat lebih lanjut dalam buku Arlina Permanasari, dkk. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC, 1999, hlm. 334; Lihat juga Fadillah Agus (ed). *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*. Jakarta: FH. Trisakti-ICRC, 1997, hlm. 85-86

<sup>32</sup> Muhammad Khaerul Kadar. *Lock.Cit.*, hlm. 24

<sup>33</sup> I Wayan Parthiana. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 280

<sup>34</sup> J. G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008, hlm. 66

<sup>35</sup> Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama. 2006, hlm. 64

<sup>36</sup> Achmad Romsan Dkk, *Op.Cit.*, hlm. 88

kewajiban tertentu terhadap negara yang menampung mereka.

- 3) Pengusiran terhadap pengungsi dari negara suaka merupakan hal yang sangat serius sehingga hanya boleh dilakukan dalam keadaan khusus, yaitu atas dasar risiko terhadap keamanan nasional atau mengganggu ketertiban masyarakat.
- 4) Karena pemberian suaka adalah beban yang tak tertanggungkan bagi beberapa negara tertentu, maka penyelesaian yang memuaskan hanya dapat dilakukan melalui kerjasama internasional.
- 5) Perlindungan pengungsi merupakan tindakan kemanusiaan, oleh karenanya pemberian suaka tidak seharusnya menimbulkan ketegangan di antara negara-negara.
- 6) Negara harus bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya dan untuk memfasilitasi tugas-tugasnya dalam mengawasi diterapkannya konvensi secara benar.
- 7) Konvensi ini mengatur tentang Kartu Tanda Pengenal (KTP), dokumen perjalanan, tentang naturalisasi serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah administrasi lainnya.
- 8) Konvensi ini mengatur tentang status pengungsi, hak untuk mendapat pekerjaan dan kesejahteraan lainnya.



Konvensi ini dibuat dalam rangka menangani masalah pengungsi yang timbul setelah perang di Eropa. Meskipun definisi pengungsi bersifat umum, definisi ini mencakup orang-orang yang lari dari negara asalnya akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1951 dan negara peserta konvensi mempunyai pilihan untuk membatasi cakupan pada pengungsi di Eropa saja.<sup>37</sup>

Hal yang perlu diketahui bahwa Konvensi 1951<sup>38</sup> hanya melindungi orang yang memenuhi kriteria pengungsi. Kategori orang tertentu dianggap tidak berhak menerima perlindungan pengungsi dan harus dikecualikan dari perlindungan tersebut. Termasuk di dalamnya orang yang dicurigai:

- Telah melakukan tindak kejahatan melawan perdamaian, penjahat perang, kejahatan kemanusiaan, atau kejahatan non-politik yang serius di luar negara suakanya.
- Bersalah karena melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebuah organisasi humaniter dan non-politis, UNHCR diberi mandat oleh PBB untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi bagi keadaan buruk mereka. Ditataran Internasional, UNHCR memajukan pembuatan perjanjian-

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> UNHCR. *Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967*. Switzerland: Media Relation and Public UNHCR. 2011, hlm. 3

perjanjian pengungsi internasional dan memantau pematuhan pemerintah pada hukum pengungsi.<sup>39</sup> Oleh karena itu, UNHCR berperan penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan dalam krisis kemanusiaan, khususnya masalah pengungsi internasional.<sup>40</sup>

Statuta UNHCR kemudian disusun bersamaan dengan dibuatnya Konvensi 1951, dan sebagai hasilnya perangkat hukum internasional maupun organisasi yang dirancang untuk memantaunya menjadi sangat sinkron. Pasal 35 dari Konvensi 1951 menjelaskan secara eksplisit dan meminta negara-negara peserta bekerjasama dengan UNHCR dalam setiap masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan konvensi itu sendiri, maupun dalam bidang hukum, peraturan atau keputusan-keputusan yang dibuat suatu negara yang mungkin berdampak bagi pengungsi.<sup>41</sup>

Wewenang utama UNHCR telah dikukuhkan dalam peraturan yang terlampir pada resolusi 428 (V) sidang umum PBB tahun 1950. Wewenang ini kemudian diperluas oleh resolusi-resolusi usulan dari sidang umum dan dewan ekonomi dan sosial PBB, yaitu memberikan, berdasarkan alasan kemanusiaan dan

---

<sup>39</sup> UNHCR. *Perlindungan Pengungsi, Buku Petunjuk Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: UNHCR-Uni Antar Parlemen. 2004, hlm. 24

<sup>40</sup> Ambarwati, dkk. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010, hlm. 133; Lihat juga United Nations, *Basic Fact About the United Nations*. New York: UN, hlm. 253, 264.

<sup>41</sup> UNHCR. *Op.Cit.*, hlm. 17

non-politik, perlindungan internasional kepada pengungsi serta mencari solusi permanen bagi mereka.<sup>42</sup>

#### b. Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi

Tujuan dibuatnya Protokol 1967 adalah untuk mengakomodasi penerapan Konvensi 1951 pada pergerakan pengungsian masa kini. Protokol ini dimaksudkan untuk mengatasi persoalan pengungsi yang terjadi setelah Perang Dunia II. Terutama pengungsi yang terjadi di Afrika di tahun 1950-an. Kelompok pengungsi ini jelas tidak termasuk dalam cakupan definisi pengungsi menurut Konvensi 1951 yang lebih menekankan peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951.<sup>43</sup>

Protokol ini merupakan perangkat mandiri yang dapat diikuti oleh negara-negara tanpa harus jadi peserta Konvensi 1951. Saat menjadi negara peserta dari konvensi dan/atau protokol, negara boleh menyatakan bahwa mereka akan menerapkan, atau hanya akan menerapkan dengan beberapa perubahan, beberapa pasal tertentu dari konvensi. Pertimbangan ini tidak berlaku untuk beberapa ketentuan, seperti Pasal 1 (definisi pengungsi), Pasal 3 (non diskriminasi berdasarkan ras, agama, dan negara asal), dan Pasal 33 (*non-refoulment*), dengan kata lain harus diterima oleh semua negara peserta/penandatanganan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> UNHCR. 2005. *Op.Cit.*, hlm. 6

<sup>43</sup> Achmad Romsan dkk, *Op.Cit*, hlm. 89

<sup>44</sup> UNHCR. 2005. *Op.Cit.*, hlm. 25

Secara garis besar, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengandung tiga ketentuan dasar yaitu: (1) ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan definisi siapa saja yang tidak termasuk dalam pengertian pengungsi; (2) ketentuan yang mengatur tentang status hukum pengungsi termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengungsi di negara di mana mereka menetap; dan (3) ketentuan lain yang berkaitan dengan penerapan instrumen pengungsi baik dari sudut prosedur administratif maupun diplomatik.<sup>45</sup>

## **2. Perlindungan HAM Pengungsi**

HAM adalah hak mendasar, dalam harga diri dan nilai-nilai individu manusia, kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dan kesederajatan antara bangsa yang besar dengan yang kecil. HAM dalam penerapan hendaknya tidak membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, atau bahasa. Begitu pula dalam upaya menjamin perlakuan manusiawi terutama bagi kelompok rentan. Hukum Internasional yang terfokus untuk menjaga martabat dan kesejahteraan masing-masing individu. Kedua perangkat hukum meningkatkan perlindungan pengungsi.<sup>46</sup>

Hukum HAM berlaku untuk siapa saja, termasuk pengungsi tanpa memperdulikan status resmi mereka. Hukum ini merupakan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

standar kepada pengungsi dan pencari suaka di wilayahnya. Ini sangat penting untuk negara-negara yang belum jadi peserta dari traktat pengungsi manapun baik Konvensi 1951, Protokol 1967, ataupun Konvensi Pengungsi OAU.<sup>47</sup>

Adapun perangkat HAM internasional yang berkaitan dengan pengungsi dan dijadikan sebagai dasar perlindungan dan perlakuan pengungsi. Perangkat yang dimaksud adalah DUHAM 1948, ICCPR 1966, ICESCR 1966, dan CAT 1984.

a. DUHAM (Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia) 1948

Pasal 9, 13, dan 14 DUHAM yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap hak-hak dan kebebasan dasar para pengungsi dan pencari suaka. Pasal 9 DUHAM mengatur bahwa “Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.”<sup>48</sup>

Selanjutnya Pasal 13 DUHAM mengatur bahwa :

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
- 2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.<sup>49</sup>

Lebih lanjut Pasal 14 DUHAM mengatur bahwa :

- 1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Lihat Pasal 9 Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia 1948

<sup>49</sup> *Ibid.*, Pasal 13

- 2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>50</sup>

Selain hak-hak yang terdapat dalam Pasal 9, 13, dan 14 sebagaimana yang telah disebutkan di atas, di beberapa pasal lain juga terdapat hak-hak yang krusial bagi perlindungan pengungsi, di antaranya hak atas hidup, hak atas rasa aman, hak untuk mencari dan menikmati suaka, bebas dari penyiksaan atau perlakuan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, bebas dari perbudakan, kebebasan berpikir dan beragama, bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.<sup>51</sup>

b. ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*)  
1966

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (selanjutnya disingkat Kovenan Sipol) 1966 merupakan kovenan yang disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.2200 A (XXI). *Kovenan Sipol* bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Pasal 14

<sup>51</sup> Asep Mulyana, 2011, [\*Membaca Fenomena Pengungsi dan Pencari Suaka\*](#), Penelitian oleh Komnas HAM.

hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.<sup>52</sup>

Kovenan sipol muncul atas dasar cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>53</sup>

Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan pengungsi maka para pengungsi juga mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan dasar seperti disebutkan dalam instrumen hak asasi manusia internasional. Dengan demikian maka perlindungan bagi pengungsi harus dilihat dalam konteks perlindungan hak asasi manusia yang lebih luas.<sup>54</sup>

Hak-hak mengenai perlindungan pengungsi juga diatur dalam Kovenan sipol yang terdapat dalam Pasal 12, 13, 14, dan Pasal 16. Dalam Pasal 12 diatur bahwa :

- 1) Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.
- 2) Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri.
- 3) Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna

---

<sup>52</sup> Lihat lebih lanjut Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik bagian penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.

- 4) Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.<sup>55</sup>

Selanjutnya Pasal 13 mengatur bahwa :

“Seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara Pihak dalam Kovenan ini, hanya dapat diusir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada alasan-alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang.”<sup>56</sup>

Kemudian Pasal 14 mengatur bahwa :

- 1) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

---

<sup>55</sup> Lihat Pasal 12 Kovenan Sipol 1966

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 13



- 2) Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
- 3) Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
  - a. Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
  - b. Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
  - c. Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
  - d. Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
  - e. Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
  - f. Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
  - g. Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
- 4) Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
- 5) Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
- 6) Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang

telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

- 7) Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.”<sup>57</sup>

Selanjutnya Pasal 16 Kovenan Sipol mengatur bahwa:

“setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.”<sup>58</sup> Dengan demikian bahwa setiap negara berkewajiban untuk berupaya keras bagi pemajuan dan pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini.

c. ICESCR ([International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights](#)) 1966

Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (selanjutnya disingkat Kovenan Ekosob) merupakan kovenan yang membahas tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dimana hak-hak tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia.<sup>59</sup>

Hak Ekosob menciptakan kondisi bagi peningkatan kapabilitas dengan menghapuskan deprivasi/kesenjangan. Hak-hak ini memungkinkan kebebasan untuk menentukan cara hidup

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 14

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 16

<sup>59</sup> [Indonesia ESC Rights Action Network](http://indonesia-escrights-net.blogspot.com/2009/08/mengenal-kovenan-internasional-tentang.html), *Mengenal Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekosob (ICESCR)*, (<http://indonesia-escrights-net.blogspot.com/2009/08/mengenal-kovenan-internasional-tentang.html>), Diakses Tanggal 13 Nopember 2013 pukul 22:48 WITA.

yang kita hargai. Potensi manusia bisa diekspresikan melalui hak-hak sipil dan politik namun pengembangan potensi tersebut membutuhkan keadaan-keadaan sosial dan ekonomi yang memadai.<sup>60</sup>

Perlindungan Hak-hak pengungsi atau warga negara asing/imigran dalam kovenan ini diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

- 1) Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya dibidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.
- 2) Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
- 3) Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.<sup>61</sup>

d. CAT ([\*The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment\*](#))

1984

[Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan](#)

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Lihat Pasal 2 Kovenan Ekosob 1966

Martabat Manusia (selanjutnya disingkat Konvensi Anti Penyiksaan) adalah sebuah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan terjadi di seluruh dunia.

Konvensi ini mewajibkan Negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah penyiksaan terjadi di wilayahnya dan konvensi melarang pemulangan paksa atau ekstradisi terhadap seseorang ke negara lain di mana ia berhadapan dengan risiko penyiksaan.<sup>62</sup>

Perlindungan HAM pengungsi atau warga negara asing/imigran mengenai anti penyiksaan diatur dalam Pasal 3, bahwa:

- 1) Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengusir, mengembalikan (*refouler*), atau mengekstradisi seseorang kenegara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu dalam bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.
- 2) Untuk menentukan apakah terdapat alasan-alasan semacam itu, pihak berwenang harus mempertimbangkan semua hal yang berkaitan, termasuk apabila mungkin, terdapat pola tetap pelanggaran yang besar, mencolok, atau massal terdapat hak asasi manusia di negara tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> ICJR, 2012, *Konvensi Anti Penyiksaan*, (<http://icjr.or.id/konvensi-anti-penyiksaan/>). Diakses Tanggal 13 Nopember 2013 pukul 23:28 WITA.

<sup>63</sup> Lihat Pasal 2 Konvensi Anti Penyiksaan 1984

## **G. Kewajiban dan Hak Pengungsi**

### **1. Kewajiban Pengungsi**

Konvensi Pengungsi 1951 memberikan beberapa kewajiban bagi pengungsi antara lain:

“Setiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dimana ia berada agar ia menyesuaikan diri dengan undang-undang dan peraturan-peraturan negara itu termasuk tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum”.<sup>64</sup>

Pada prinsipnya negara-negara tidak akan mengenakan sanksi pidana terhadap pengungsi yang secara langsung datang dari suatu wilayah dimana kehidupan atau kebebasan mereka terancam, dengan alasan bahwa mereka memasuki atau berada dalam wilayah mereka tanpa izin, dengan syarat pengungsi tersebut sesegera mungkin melaporkan diri kepada pihak yang berwajib dan memberikan alasan yang mendasar mengenai masuknya atau keberadaan mereka secara tidak sah di wilayahnya itu.<sup>65</sup>

Pengusiran seorang pengungsi itu hanya akan dilakukan menurut keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum yang semestinya. Pengungsi harus diperkenankan menyampaikan bukti untuk membebaskan dirinya dan permohonan naik banding serta diwakili untuk diajukan dihadapan pejabat yang berwenang,

---

<sup>64</sup> Lihat Pasal 2 Konvensi 1951

<sup>65</sup> Lembar Disposisi Direktorat HAM dan Kemanusiaan. *Lock.Cit.*, hlm. 19

atau perangkat hukum yang secara khusus ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan.<sup>66</sup>

Pada dasarnya menurut Konvensi 1951, negara tempat menetapnya pengungsi tidak boleh mengusir dengan cara apapun ke perbatasan wilayah dimana kehidupan atau kebebasannya itu terancam karena alasan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaannya pada suatu kelompok sosial tertentu atau paham politik tertentu. Namun demikian, pengungsi tidak dapat menuntut perlakuan ini apabila ada alasan-alasan yang mendasar untuk berada atau karena dijatuhi oleh pengadilan yang tidak dapat diubah lagi atas suatu kejahatan yang merupakan bahaya terhadap masyarakat negara yang bersangkutan.<sup>67</sup>

## **2. Hak-hak Pengungsi**

Disamping mematuhi dan melaksanakan kewajibannya, pengungsi juga mempunyai hak. Hak-hak pengungsi<sup>68</sup> diatur dalam Konvensi 1951, antara lain:

- a. Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif (Pasal 3,4,5, dan 6)

Yang menjadi perhatian mengenai hak pengungsi ini bahwa pengungsi akan diperlakukan sebaik mungkin sebagaimana yang diberikan kepada warga negara

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 21

<sup>68</sup> Lihat Pasal 3-24 Konvensi 1951

mereka. Termasuk juga dalam mengamalkan secara bebas agama mereka dan perlindungan tindakan diskriminatif mengenai ras, agama, atau negara asal pengungsi.

b. Hak atas benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 13)

Mengenai perlindungan pengungsi harus diberikan sebaik mungkin pada kejadian apapun. Setidaknya sama dengan yang diberikan pada umumnya pada orang asing dalam keadaan yang sama mengenai hak mendapatkan harta bergerak dan tidak bergerak, hak-hak lain yang berkaitan dengan itu serta mengenai sewa dan perikatan lainnya yang berkaitan dengan harta bergerak dan tidak bergerak.

c. Hak atas kesenian dan hak milik perindustrian (Pasal 14)

Mengenai hak milik perindustrian seperti penemuan-penemuan, desain-desain, atau model-model merek dagang, nama dagang dan hak-hak dalam karya seni serta karya ilmiah, maka seorang pengungsi di negara ia bertempat tinggal akan diberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara dari negara yang bersangkutan di dalam wilayahnya, ia akan diberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan

dalam wilayah tersebut kepada warga negara dimana ia bertempat tinggal.

d. Hak atas perkumpulan (Pasal 15)

Berkaitan dengan pendirian perhimpunan non-profit dan serikat buruh maka negara akan memberikan kepada pengungsi yang sah akan diperlakukan selayaknya perlakuan kepada warga negara asing dalam keadaan yang sama.

e. Hak akses ke pengadilan-pengadilan (Pasal 16)

Seorang pengungsi mendapat akses ke pengadilan dalam wilayah semua negara meratifikasi Konvensi 1951 dan mendapat perlakuan yang sama seperti warga negara dalam hal akses ke pengadilan termasuk pula bantuan hukum.

f. Hak atas pekerjaan yang menghasilkan upah (Pasal 17)

Negara peserta Konvensi 1951 akan memberikan kepada pengungsi yang berada dalam wilayah mereka dan mereka mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara yang bersangkutan dalam hal gaji dan hak untuk bekerja. Adapun syarat yang harus dipenuhi pengungsi supaya tidak mengalami pembatasan dalam pasar tenaga kerja nasional setelah diratifikasinya konvensi ini, adalah:



- 1) Dia telah tinggal di negara tersebut selama tiga tahun penuh.
- 2) Dia mempunyai suami/isteri yang memiliki kewarganegaraan tempat tinggalnya dan tidak dapat menuntut keuntungan jika dia meninggalkan suami/isterinya.
- 3) Dia mempunyai satu orang anak atau lebih yang memiliki kewarganegaraan tempat tinggalnya.

g. Hak berwiraswasta (Pasal 18)

Negara peserta konvensi memberikan kepada pengungsi yang warga negaranya secara sah yang sama dengan kepentingan sendiri dan perdagangan serta bidang pertanian.

h. Hak untuk jadi pekerja bebas (Pasal 19)

Negara akan memberikan hak untuk bekerja sesuai dengan ijazah dan kemampuan pengungsi yang diakui oleh pihak negara bersangkutan. Negara akan menggunakan usaha terbaiknya sesuai dengan ketentuan dan konstitusi mereka untuk menjamin pemukiman pengungsi di dalam wilayahnya.

i. Hak atas penempatan (Pasal 20)

Pengungsi mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara tempat ia tinggal dalam hal sistem

pemberian jatah dan penyaluran umum produk-produk yang terbatas persediaannya.

j. Hak atas perumahan (Pasal 21)

Mengenai perumahan, sejauh masalahnya diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan para penguasa pemerintah maka negara peserta konvensi melakukan yang terbaik setidaknya setara dengan yang didapatkan oleh warga negaranya.

k. Hak atas pendidikan (Pasal 22)

Negara peserta konvensi memberikan kepada pengungsi mengenai hak pendidikan dasar, terutama mengenai akses studi pengakuan sertifikat, sekolah asing, ijazah dan keserjanaan, pembebasan pungutan, serta pemberian beasiswa yang samam dengan warga negaranya.

l. Hak mendapat bantuan umum (Pasal 23)

Bantuan umum diberikan oleh negara peserta konvensi kepada pengungsi yang secara sah mendiami wilayahnya seperti apa yang diberikan oleh warga negaranya.

m. Hak atas perburuhan dan jaminan sosial (Pasal 24)

Hak perburuhan di sini dimaksudkan seperti dalam hal penggajian, termasuk upah keluarga, peraturan lembur,

batasan umur minimum bekerja, magang dan pelatihan, pekerjaan wanita dan anak muda sejauh hal itu diatur dalam undang-undang penguasa administratif negara bersangkutan.

#### **H. Instrumen Hukum Nasional Sebagai Standar Perlakuan Pengungsi di Indonesia**

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pemerintah Indonesia bukanlah negara peserta Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi, namun bukan berarti pemerintah dapat lepas tangan terhadap masalah pengungsi yang terjadi di wilayah teritorial Indonesia. Sebagai anggota PBB Indonesia mempunyai tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi HAM warga negaranya dan bangsa lain sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD RI 1945) dan di dalam sila ke-2 pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan pada alinea ke-4 pembukaan UUD RI 1945 dan perubahannya serta pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Secara jelas bahwa pemerintah Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada perlindungan, penegakan, pemajuan, dan

pemenuhan HAM, menjadi tugas pemerintah tak terkecuali pada pengungsi internasional yang ada di wilayahnya.<sup>69</sup>

Di samping pemerintah Indonesia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap orang asing/pengungsi, orang asing/pengungsi juga mempunyai kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa setiap pengungsi berkewajiban untuk menyesuaikan diri terhadap peraturan perundang-undangan di wilayah dimana ia berada.<sup>70</sup>

Hingga saat ini di Indonesia belum ada peraturan nasional yang mengatur secara eksplisit tentang pengungsi, namun bukan berarti pemerintah Indonesia memberikan kebebasan terhadap pengungsi untuk bertindak semaunya yang akan berujung pada kekacauan. Jika pengungsi melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, maka ada beberapa instrumen hukum Indonesia yang kemudian dapat di terapkan bagi pengungsi internasional yang berada di wilayah Indonesia, yakni :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi

---

<sup>69</sup> Muhammad Khaerul Kadar. *Lock.Cit.*, hlm. 53-54; Lihat juga lembar disposisi Direktur HAM dan Kemanusiaan. *Lock.Cit.*, hlm. 12

<sup>70</sup> Lihat Pasal 2 konvensi 1951

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
5. Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297, tanggal 20 September 2002, Perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi penelitian**

Berdasarkan judul skripsi penulis “Pelanggaran Hukum Nasional Indonesia yang Dilakukan Oleh Pengungsi (Suatu Tinjauan Hukum Pengungsi Internasional)” maka penulis merencanakan penelitian ini akan dilaksanakan di lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Kantor Perwakilan UNHCR Jakarta
2. Kantor Perwakilan ICRC Jakarta
3. Kantor Perwakilan IOM Jakarta
4. Kantor Dinas Imigrasi Wilayah Makassar
5. Kantor Perwakilan UNHCR Wilayah Makassar
6. Rumah Detensi Imigrasi Makassar Wilayah Kabupaten Gowa
7. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara terbatas berkaitan dengan penelitian yang penulis kaji. Selain itu, penulis juga memperoleh Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai bacaan yang berkaitan dengan objek kajian dalam skripsi ini

seperti buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis dalam bentuk media cetak dan media internet.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui serangkaian Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Pustaka (*Library Research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara, baik langsung maupun melalui media elektronik seperti email dan lain-lain. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian dalam skripsi ini antara lain berupa buku, jurnal, dokumen-dokumen, artikel dan karya-karya tulis dalam bentuk media cetak dan media internet.

### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelusuran terhadap ketentuan perundang-undangan internasional seperti konvensi, statuta, protokol maupun deklarasi. Kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta gambaran berkenaan dengan permasalahan penelitian yang penulis kaji.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Pelanggaran Hukum Nasional Indonesia yang Dilakukan Oleh Pengungsi yang Berada di Wilayah Indonesia**

Seperti yang telah kita ketahui bahwa sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 mengenai pengungsi, serta belum ada peraturan hukum nasional yang secara khusus mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Maka, Indonesia secara langsung tidak berkewajiban atas penanganan pengungsi yang ada di wilayah Indonesia. Sejauh ini masalah penanganan terhadap pengungsi di Indonesia dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini yang dimaksudkan adalah UNHCR.<sup>71</sup>

Masalah keterikatan Indonesia terhadap penanganan pengungsi selalu menjadi pertanyaan, hal itu dikarenakan Indonesia belum meratifikasi konvensi mengenai pengungsi baik itu konvensi 1951 maupun protokol 1967. Dalam hukum Romawi dikenal azas "*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*" dimana suatu konvensi atau perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga (negara bukan pihak, yang tidak atau belum meratifikasi). Azas tersebut merupakan azas yang berlaku dalam hukum kontrak dan juga merupakan azas umum dalam konvensi atau perjanjian internasional

---

<sup>71</sup> Lembar Disposisi Direktur HAM dan Kemanusiaan. *Lock. Cit*, hlm. 5



yang menyatakan bahwa hanyalah pihak dari konvensi atau perjanjian internasional yang terikat padanya. Azas tersebut kemudian dimasukkan dalam ketentuan pasal 34 Konvensi Wina 1969.<sup>72</sup>

Namun menurut Konvensi Wina 1969, penerapan azas tersebut mempunyai beberapa pengecualian bahwa dalam beberapa hal negara ketiga yang bukan menjadi pihak atau belum meratifikasi bisa juga terikat oleh suatu konvensi atau perjanjian internasional walaupun negara ketiga tersebut tidak mengatakan kesepakatannya untuk mengikatkan dirinya pada konvensi atau perjanjian internasional tersebut melalui ratifikasi atau cara lainnya yang ditentukan oleh konvensi atau perjanjian internasional tersebut.<sup>73</sup>

Dalam Konvensi Wina 1965 mengenai perjanjian-perjanjian yang memberikan kewajiban untuk negara ketiga dinyatakan sebagai berikut:

“kewajiban negara ketiga bisa saja timbul karena ketentuan dalam perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa para pihak dari perjanjian tersebut menghendaki ketentuan itu merupakan cara untuk menciptakan kewajiban negara ketiga tersebut menerima dengan jelas dan tertulis kewajiban tersebut.”<sup>74</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa negara-negara yang belum meratifikasi suatu konvensi internasional bisa terikat oleh aturan-aturan yang ada di dalam konvensi internasional meskipun

---

<sup>72</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Tatanusa, 2008, hlm. 95; Lihat juga Muhammad Chairul Kadar, *Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Prinsip Non-refoulment, Studi Kasus Rumah Detensi Imigrasi Makassar Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan* (skripsi). Makassar: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2011, hlm. 62-63

<sup>73</sup> *Ibid*,

<sup>74</sup> Lihat pasal 35 Konvensi Wina 1969

belum meratifikasi karena aturan-aturan yang terdapat dalam konvensi tersebut termasuk dalam suatu kebiasaan internasional.

Apabila hal ini dikaitkan dengan pengungsi, seperti halnya Indonesia yang terikat dan mempunyai kewajiban terhadap persoalan pengungsi yang ada di wilayahnya. Maka seorang pengungsi yang berada di wilayah Indonesia juga terikat dan berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Pengungsi 1951 yang memberikan beberapa kewajiban bagi pengungsi antara lain:

“Setiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dimana ia berada agar ia menyesuaikan diri dengan undang-undang dan peraturan-peraturan negara itu termasuk tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum”.<sup>75</sup>

Pada prinsipnya negara-negara tidak akan mengenakan sanksi pidana terhadap pengungsi yang secara langsung datang dari suatu wilayah dimana kehidupan atau kebebasan mereka terancam, dengan alasan bahwa mereka memasuki atau berada dalam wilayah mereka tanpa izin, dengan syarat pengungsi tersebut sesegera mungkin melaporkan diri kepada pihak yang berwajib dan memberikan alasan yang mendasar mengenai masuknya atau keberadaan mereka secara tidak sah di wilayahnya itu.<sup>76</sup>

Masalah pengungsi telah menjadi perhatian khusus dari komunitas internasional karena jumlahnya terus meningkat dan

---

<sup>75</sup> Lihat Pasal 2 Konvensi 1951

<sup>76</sup> Lembar Disposisi Direktorat HAM dan Kemanusiaan. *Lock.Cit.*, hlm. 19

berdampak langsung terhadap keamanan nasional sebuah negara, salah satunya adalah Indonesia.<sup>77</sup> Penyebrangan ilegal yang dilakukan oleh para pengungsi ini dianggap sebagai ancaman oleh pihak Indonesia karena telah melanggar hukum keimigrasian Indonesia sesuai dengan UU No.9 Tahun 1992 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Indonesia harus memiliki surat perjalanan.<sup>78</sup>

Fenomena kemunculan pengungsi<sup>79</sup> di Indonesia seringkali dianggap membawa efek negatif bagi negara transit seperti Indonesia. Para pengungsi berpotensi melakukan tindakan-tindakan kriminal, membebani negara transit dan negara tujuan karena harus menyediakan fasilitas yang diambil dari pajak masyarakat. Hal ini berdampak munculnya penolakan dari masyarakat lokal negara transit dan negara tujuan. Kedatangan pengungsi dari luar Indonesia telah menyebabkan munculnya masalah baru bagi pemerintah seperti pencurian, kekerasan seks, penyelundupan manusia.<sup>80</sup>

Riau menjadi gerbang awal para pengungsi karena menjadi wilayah terdekat untuk menyebrang dari Malaysia. Setelah mencapai

---

<sup>77</sup> Poltak Partogi Nainggolan. *Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara*. dalam <https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:iyc3KXryg6kJ:www.pdii.lipi.go.id/wp-content/uploads/2012/04/Masalah-negara-kepulauan-di-era-globalisasi.pdf+Poltak+Partogi+Nainggolan.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2014 pukul 13.20 wita

<sup>78</sup> Yoyok Syahputra, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Keimigrasian menurut Undang-Undang RI* (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2007, hlm 45

<sup>79</sup> Pengungsi dari Afghanistan, Myanmar, Somalia, Sudan dan lain-lain yang berada di Rudenim Makassar.

<sup>80</sup> *Ibid.*

Riau, pengungsi akan mudah menyebar ke wilayah selatan Indonesia seperti Cianjur, Pelabuhan Ratu, Merak, Rote, dan Lombok untuk kembali menyebrang ke Pulau Christmas, Australia. Pulau Christmas merupakan pulau yang termasuk ke wilayah Australia, akan tetapi jaraknya lebih dekat dengan Indonesia tepatnya 200 mil laut dari Pulau Jawa. Di pulau tersebut terdapat pusat migran (*detention center*) yang didirikan oleh Departemen Imigrasi Australia (*Departement of Immigration and Citizenship/DIAC*) yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara ketika menunggu pemberian *permanent visa* dari Australia.<sup>81</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari data populasi *online* UNHCR, dari tahun ke tahun jumlah para pengungsi dan pencari suaka terus meningkat, jika mengacu pada data tahun 2008, terdapat 726 pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. hingga pada tahun 2011 terdapat 4239 pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan bapak Santoso Kushartoyo Budi (ICRC)

<sup>82</sup> Hegar Julius Budi Hartono, *Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Masalah Pengungsi dan Pencari Suaka Di Indonesia 2008-2011* (skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia. 2013, hlm. 73; Lihat juga [www.unhcr.org/statistics/populationdatabase](http://www.unhcr.org/statistics/populationdatabase).

Tabel. 3.1 data pengungsi dan pencari suaka di Indonesia  
tahun 2008-2011

Periode	Total refugees Of <i>whom assisted by UNHCR</i>	Asylum Seekers (pending cases)	Total population of concern
2008	369	353	722
2009	798	1769	2567
2010	811	2071	2882
2011	1006	3233	4239

Sumber: [www.unhcr.org/statistics/populationdatabase](http://www.unhcr.org/statistics/populationdatabase)

Tabel diatas menunjukkan peningkatan jumlah populasi para pengungsi dan pencari suaka yang mencapai kurang lebih 500 persen. Mayoritas mereka berasal dari negara Afghanistan, yang jumlah setengah dari jumlah mereka yang berasal dari negara lainnya, diantaranya berasal dari Iraq, Iran, Myanmar Somalia. Sedangkan jumlah pengungsi yang sudah terdaftar sebagai pengungsi UNHCR pada tahun 2011 terdapat sebanyak 1006 pengungsi, mayoritas dari mereka berasal dari Afghanistan, Sri Lanka, Myanmar, Somalia, Irak, Iran, selebihnya berasal dari China, Republik Kongo, Ethiopia, Thailand, Ukraina, Yaman, Kuwait.<sup>83</sup> Sampai dengan akhir Oktober 2012 terdapat 6.995 pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta.<sup>84</sup>

Selain itu, berdasarkan laporan PBB pada tahun 2011 terdapat 47,5 juta sebagai pengungsi, orang terdusur, dan pencari suaka yang tersebar di seluruh negara. Di wilayah Sulawesi Selatan sendiri, pada

<sup>83</sup> Hegar Julius Budi Hartono, *Lock.Cit.*, hlm. 74

<sup>84</sup> Lihat lebih lanjut tulisan Dinda. *Dampak Singgahnya Pencari Suaka Ke Australia Terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional Di Indonesia*. Surabaya: Jurnal "Analisis Hubungan Internasional", Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Vol. II, Nomor 4. Edisi Juli 2013, hlm. 52

Januari 2014 terdapat 115 pengungsi dan pencari suaka yang tercatat di Rumah Detensi Imigrasi Makassar di Kabupaten Gowa.<sup>85</sup>

Jumlah pengungsi yang semakin banyak dan menetap dalam waktu lama dapat berpotensi untuk merugikan pihak Indonesia dari segi sosial khususnya. Karena tidak jarang para pengungsi berperilaku tidak sesuai norma yang berlaku di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan yang selanjutnya dihadapi oleh *International Organization for Migration*<sup>86</sup> (selanjutnya disingkat IOM). Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh IOM ialah munculnya tindakan-tindakan yang melanggar hukum dilakukan oleh pengungsi. Tindakan melanggar hukum berupa pencurian, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba dan tindakan terorisme. Menurut Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri), pencari suaka atau pengungsi yang singgah di wilayah Indonesia berpotensi menjadi kurir narkoba internasional bahkan tindakan terorisme.<sup>87</sup>

Menurut data Polri, pada tahun 2009 terdapat 31 kasus pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pengungsi. Salah satu contoh di lapangan mengenai tindakan pengungsi yang dinilai melanggar hukum dan norma di Indonesia terjadi di daerah Bogor.

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara non-formal dengan Ibu Masniati, S.H. (Kepala Seksi Administrasi dan Registrasi Rumah Detensi Imigrasi Kab. Gowa)

<sup>86</sup> IOM bertujuan untuk membantu pemerintah-pemerintah berbagai negara di dunia dalam mengembangkan dan menetapkan kebijakan, perundang-undangan dan mekanisme administratif migrasi.

<sup>87</sup> Admin Humas Mabes Polri. *Penyebab kejahatan transnasional*. <http://www.polri.go.id/kasus-all/ks/t/> . Diakses pada tanggal 15 April 2014 pukul 15.50 wita

Warga Bogor menuntut untuk pengusiran pengungsi dari wilayah Bogor dikarenakan mereka telah dianggap melanggar hukum dan norma yang berlaku. Pengungsi tersebut diduga melakukan tindakan pencurian, pelecehan seksual bahkan melanggar norma agama seperti tidak sholat Jum'at. Tindakan seperti ini dianggap berefek negatif bagi masyarakat Bogor walaupun kehadiran pengungsi di wilayah Bogor dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat lokal. Tindakan pengungsi yang melanggar hukum atau norma di Indonesia menjadi tanggung jawab UNHCR dan khususnya IOM.<sup>88</sup>

Saat ini penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka masih sangat parsial dan terbatas. Keterbatasan itu termasuk dalam hal sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana pada lembaga-lembaga terkait, melemahnya pengawasan pada jalur darat, laut dan udara, kendala dalam bidang teknologi, serta lemahnya hukum secara yuridik dan diplomatik.<sup>89</sup>

Hukum Nasional Indonesia memiliki keterbatasan dan kekosongan hukum dalam menghadapi masalah pengungsi yang masuk ke Indonesia sehingga menyebabkan koordinasi yang lemah antar institusi di lapangan. Bahkan pada dasarnya Pemerintah Daerah di Indonesia merasa keberatan apabila wilayahnya dijadikan sebagai penampungan sementara bagi para pengungsi. Contoh kasus di lapangan ketika Pemerintah Provinsi Banten merasa direpotkan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

dengan munculnya para pengungsi yang ditangkap di daerah Labuan, Banten. Pemerintah Banten bahkan harus memberikan pelayanan kesehatan terhadap pengungsi tersebut, padahal belum semua masyarakat Banten mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi ironi ketika pengungsi diperhatikan sedangkan penduduk sendiri tidak diperhatikan walaupun atas dasar kemanusiaan.<sup>90</sup>

#### 1. Bentuk-bentuk Pelanggaran

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh pengungsi,<sup>91</sup> yaitu:

- a. Memasuki wilayah Indonesia secara illegal
- b. Perkelahian
- c. Pemerkosaan
- d. Merusak Fasilitas Pengungsi

#### 2. Penyebab Terjadinya Pelanggaran

Pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia berasal dari negara-negara yang berbeda-beda dan budaya yang berbeda pula, sehingga pengungsi tersebut harus membiasakan diri, baik dengan lingkungan dimana ia tinggal maupun terhadap sesama pengungsi yang ada di tempat ia tinggal. Penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada

---

<sup>90</sup> Lihat lebih lanjut tulisan Atik Krustiyati. *Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967*. Surabaya: Jurnal "Law Review", Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Vol. XXI, Nomor 2. Edisi November 2012, hlm. 189

<sup>91</sup> Hasil wawancara non-formal dengan Ibu Masniati, S.H. (Kepala Seksi Administrasi dan Registrasi Rumah Detensi Imigrasi Kab. Gowa)



lingkungannya. Sehingga permusuhan, kemarahan depresi, dan emosi negatif lain sebagai respon pribadi yang tidak sesuai dan kurang efisien bisa diatasi.<sup>92</sup>

Penyebab yang memicu terjadinya pelanggaran adalah adanya perbedaan aturan nasional, budaya, dan adat dan kebiasaan di Indonesia dengan di negara asalnya. Penyebab lain yang membuat para pengungsi dan pencari suaka berkeliraran hingga melakukan pelanggaran adalah kurangnya jumlah Rumah Detensi Imigrasi<sup>93</sup> (selanjutnya disingkat Rudenim) yang ada di Indonesia. Hingga saat ini, hanya terdapat 13 Rudenim<sup>94</sup> yang tersebar dengan jumlah penghuni (deteni) mencapai 3.111 orang warga asing. Dengan demikian, setiap Rudenim rata-rata menampung deteni 300 orang. Sehingga sebagian pengungsi dan pencari suaka lebih memilih kabur dan hidup di luar Rudenim.<sup>95</sup>

Kondisi di 13 Rudenim di Indonesia semuanya telah *over capacity*, sehingga masih sering ditemukannya pengungsi dan pencari suaka yang tinggal di tempat penginapan dan di tengah-tengah masyarakat. Dalam segi pengamanan di rudenim para petugas penjaga mengaku tidak dapat bekerja sendiri karena yang

---

<sup>92</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

<sup>93</sup> Rudenim adalah tempat penampungan imigran setelah melalui tes kesehatan dan wawancara untuk mengetahui tujuannya ke Indonesia.

<sup>94</sup> Adapun lokasi Rudenim yang ada di Indonesia yaitu Rudenim Pusat Tanjungpinang, Medan, Pekanbaru, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Kupang, Pontianak, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Jayapura.

<sup>95</sup> Dinda. *Lock.Cit.*, hlm. 27

ditangani adalah ratusan pencari suaka, untuk itu pihak rudenim selalu berkordinasi dengan petugas kepolisian setempat untuk menangani pencari suaka yang kabur.<sup>96</sup>

#### **B. Bentuk Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Hukum Nasional Indonesia yang Dilakukan Oleh Pengungsi yang Berada Di Wilayah Indonesia**

Setelah para pengungsi dan pencari suaka berhasil memasuki wilayah Indonesia, kemudian singgah dan ditempatkan di Rudenim, tak jarang beberapa kasus kejahatan transnasional terjadi akibat ulah para pengungsi dan pencari suaka tersebut. Fungsi polisi dalam struktur kehidupan masyarakat adalah sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum serta memiliki tanggung jawab secara khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan kejahatan transnasional maupun pencegahan kejahatan transnasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>97</sup>

Dengan dilandasi oleh peran dan tanggung jawab sebagai pemelihara keamanan tersebut, Polri memiliki tugas-tugas yang mencakup sejumlah tindakan yaitu bersifat pre-emptif (penangkalan), preventif (pencegahan), dan represif (penanggulangan) yang sesuai

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Lihat Undang-undang No. 2 tahun 2002 pasal 5 ayat (1)

dengan fungsi polisi dalam konteks universal.<sup>98</sup> Tugas pre-emptif diarahkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal, seperti faktor-faktor korelatif kriminogen yang berpotensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tugas preventif lebih mengarah pada mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban melalui kehadiran polisi di tengah masyarakat. Sedangkan tugas represif adalah pada upaya penindakan hukum jika gangguan keamanan dan ketertiban tersebut terlanjur terjadi guna mengembalikan pada situasi yang kondusif.<sup>99</sup>

Direktorat Jenderal Imigrasi (selanjutnya disingkat Ditjen) menyediakan rudenim yang tersebar di beberapa daerah untuk menampung sementara para pengungsi. Fungsi pengawasan Ditjen Imigrasi dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengungsi.<sup>100</sup>

Pada dasarnya Pemerintah Indonesia tetap berperan dalam pengawasan pengungsi tersebut karena telah menetap di wilayah Indonesia. Fungsi pengawasan tersebut perlu dilakukan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat melanggar peraturan yang berlaku. Karena muncul masalah seperti pelanggaran keimigrasian

---

<sup>98</sup> Dinda. *Lock.Cit.*, hlm. 24; Lihat juga Djanisius Djamin. 2007. *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. P 54

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Hasil wawancara non-formal dengan Ibu Masniati, S.H. (Kepala Seksi Administrasi dan Registrasi Rumah Detensi Imigrasi Kab. Gowa)

yang dilakukan oleh para pengungsi contohnya: pengungsi memiliki pekerjaan, memiliki properti seperti tanah, bahkan hingga penyalahgunaan narkoba.

Menurut Data UNHCR, pada tahun 2009 terdapat 2.676 imigran ilegal yang terdiri atas 798 jiwa Pengungsi, 1.769 Pencari Suaka, 311 Pengungsi yang kembali. Di Indonesia, IOM mencatat pada tahun 2009 terdapat 1.323 pengungsi yang telah dibantu oleh IOM. Mayoritas pengungsi dengan jumlah 487 jiwa adalah pengungsi Afghanistan.<sup>101</sup>

Peran IOM sebagai Inisiator dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia didasari atas terbatasnya hukum nasional Indonesia yang mengatur masalah pengungsi. Maka peran IOM sebagai mediator memberikan solusi kepada pihak Indonesia dan pengungsi dengan aktivitas IOM bertanggung jawab atas keberadaan pengungsi di Indonesia serta aktivitas IOM dalam menyediakan fasilitas pemulangan sukarela bagi para pengungsi. Solusi yang ditawarkan oleh IOM memang tidak selamanya dapat diterima oleh pihak Indonesia dan pengungsi. Penyuluhan sukarela yang ditawarkan oleh IOM terhadap pengungsi seringkali diabaikan bahkan ditolak.<sup>102</sup> Terlebih beberapa kasus permasalahan juga kerap terjadi di sejumlah Rudenim, seperti kasus pencari suaka asal Afghanistan yang melarikan diri di Rudenim Pontianak pada 23 Februari 2012 dan

---

<sup>101</sup> Hegar Julius Budi Hartono. *Lock.Cit.*, hlm. 74; Lihat juga [www.unhcr.org/statistics/populationdatabase](http://www.unhcr.org/statistics/populationdatabase).

<sup>102</sup> *Ibid.*

kericuhan antar sesama imigran ataupun dengan masyarakat, seperti yang terjadi di Rudenim Riau pada 28 Juli 2012.<sup>103</sup>

Selain itu pada kenyataannya, para pengungsi lebih memilih meninggalkan fasilitas yang diberikan IOM dan menyebrang ke wilayah Australia melalui jalur pelabuhan tradisional Indonesia seperti di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Hasilnya, banyak kasus perahu yang membawa para pengungsi tenggelam di tengah laut karena minimnya fasilitas dan kelayakan perahu.<sup>104</sup>

Terdapat dua kerangka solusi bagi Indonesia dalam menangani masalah kaum migran ini. Pertama, perlunya kerjasama internasional terutama dengan negara-negara terdekat. Untuk Indonesia yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia. Kedua, perlunya kerjasama dengan badan-badan internasional yang menangani imigran atau berhubungan dengannya, seperti Komisi PBB untuk Urusan Pengungsi, Organisasi Internasional yang Mengurusi Migrasi. Di samping dua hal tersebut pada tahun 2001 lalu, Pemerintah telah merancang Keputusan Presiden (Kepres) untuk panduan penanganan pengungsi. Sudah saatnya penanganan terhadap pengungsi yang masuk ke Indonesia ditangani secara terintegritas karena kasusnya terjadi di beberapa provinsi.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Dinda. *Lock.Cit.*, hlm. 3

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.

Dengan demikian, ada beberapa instrumen hukum Indonesia yang kemudian dapat diterapkan bagi pengungsi internasional yang berada di wilayah Indonesia, yakni:

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 2 :

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”

Pasal 170 :

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- (2) Yang bersalah diancam:
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang  
Keimigrasian

Pasal 113:

“Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

6. Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297, tanggal 20 September 2002, Perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi
- a) Secara umum melakukan penolakan kepada orang asing yang datang memasuki wilayah Indonesia, yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b) Apabila terdapat orang asing yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka pada saat tiba di Indonesia, agar tidak dikenakan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian ke wilayah negara yang mengancam kehidupan dan kebebasannya;
  - c) Apabila diantara orang asing dimaksud diyakini terdapat indikasi sebagai pencari suaka atau pengungsi, agar saudara menghubungi organisasi internasional masalah pengungsian atau *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) untuk penentuan statusnya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan internasional terhadap pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terdapat ketentuan yang berisikan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban para pengungsi seperti hak untuk tidak dipulangkan ke negara asalnya (*non-refoulement*). Selain mendapatkan hak-haknya, pengungsi juga dibebankan beberapa kewajiban seperti menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku di negara ia berada dan kewajiban membayar pajak dan biaya-biaya fiskal lainnya. Dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia, diperlukan kerjasama internasional terutama dengan negara-negara terdekat. Selain itu kerjasama dengan badan-badan internasional yang menangani imigran atau berhubungan dengannya, seperti Komisi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), Organisasi Internasional yang Mengurusi Migrasi (IOM) juga sangat penting. Konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekankan pada usaha pengembangan instrumen hukum



internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum internasional, khusus yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas perjalanan. Sedangkan peran IOM dalam menangani pengungsi dan pencari suaka di Indonesia adalah mengurus dan menjamin kehidupan para pengungsi dan pencari suaka dengan memberikan tempat penampungan (rudenim).

2. Ancaman terjadinya pelanggaran akan meningkat apabila suatu negara memiliki banyak akses yang memudahkan para pengungsi dan pencari suaka bisa memasuki wilayah negara dengan mudah dan apabila suatu negara tidak memiliki kapabilitas yang memadai untuk penanganan para pengungsi dan pencari suaka. Kapabilitas tersebut berisi daya tangkal yang handal serta kebijakan penanganan yang strategis. Di Indonesia belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang perilaku pengungsi dan pencari suaka. Namun, bukan berarti bahwa para pengungsi dan pencari suaka tersebut bebas melakukan tindakan apapun. Adapun instrumen nasional yang digunakan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengungsi dan pencari suaka di Indonesia adalah UU No. 1 tahun 1946, UU No. 6 tahun 2011, dan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297, tanggal 20

September 2002, Perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kerjasama yang intensif antara pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga internasional yang khusus menangani masalah pengungsi dan pencari suaka seperti UNHCR dan IOM, kemudian memberikan transparansi atau keterbukaan informasi tentang masalah pengungsi dan pencari suaka, baik melalui media cetak maupun melalui media *online*.
2. Diharapkan pemerintah Indonesia membuat aturan khusus mengenai batas-batas perilaku pengungsi dan pencari suaka yang ada di wilayahnya agar pengungsi dan pencari suaka tidak bertindak sembarangan. Sehingga negara lain dapat mencontoh Indonesia dalam menangani masalah pengungsi meskipun Indonesia bukanlah negara pihak dalam Konvensi 1951. Hal ini dapat membantu mengurangi hingga mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengungsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Achmad Romsan, dkk. *Pengantar hukum Pengungsi Internasional*. Bandung: Sanic Offset, 2003.

Alma Manuputty, dkk. *Hukum Internasional*. Depok: Rech-ta, 2008.

Ambarwati, dkk. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Arlina Permanasari, dkk. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC, 1999.

D. W. Bowett. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika. 2007.

Damos Dumoli Agusman. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Fadillah Agus (ed). *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*. Jakarta: FH. Trisakti-ICRC, 1997.

Godwin-Grill, Guy S. *The Refugee in Internasional Law, Second Edition*. Great Britain: Clarendon Press-Oxford, 1966.

I Wayan Parthiana. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju. 2003.

J. G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama. 2006.

John O'Brien. *International Law*. Cavendish Publishing Limited: Great Britain. 2001.

Mochtar Kusumatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni. 2003.

Sefriani. *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Tatanusa. 2008.

United Nations. *Basic Fact About the United Nations*. New York: UN.

UNHCR. *Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967*. Switzerland: Media Relation and Public UNHCR. 2011.

\_\_\_\_\_. *Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR*, Switzerland: Media Relation and Public UNHCR, 2007.

\_\_\_\_\_. *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*. Switzerland: Komisi Tinggi PBB Untuk Urusan Pengungsi, 2005.

\_\_\_\_\_. *Pengungsi Dalam Angka*

\_\_\_\_\_. *Perlindungan Pengungsi, Buku Petunjuk Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: UNHCR-Uni Antar Parlemen. 2004.

\_\_\_\_\_. *The 1951 Refugee Convention Question & Answers*. 2007.

Wagiman. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra. *Hukum Internasional, Bunga Rampai*. Bandung: Alumni. 2003.

#### **Sumber Lain :**

Admin Humas Mabes Polri. *Penyebab kejahatan transnasional*. <http://www.polri.go.id/kasus-all/ks/t/>. Diakses Tanggal 15 April 2014 pukul 15.50 WITA.

Asep Mulyana. [Membaca Fenomena Pengungsi dan Pencari Suaka](#), Penelitian oleh Komnas HAM. 2011.

Atik Krustiyati. *Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967*.

Surabaya: Jurnal "Law Review", Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Vol. XXI, Nomor 2. Edisi November 2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.

Dinda. *Dampak Singgahnya Pencari Suaka Ke Australia Terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional Di Indonesia*. Surabaya: Jurnal "Analisis Hubungan Internasional", Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Vol. II, Nomor 4. Edisi Juli 2013

Eny Suprpto, *Permasalahan seputar Pengungsi dan IDP's*, (<http://sekitarkita.com/2002/08/permasalahan-seputar-pengungsi-dan-idps-/2009-komunitassekitarkita>) Diakses Tanggal 14 Nopember 2013 pukul 15.00 WITA.

Hegar Julius Budi Hartono. *Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Masalah Pengungsi dan Pencari Suaka Di Indonesia 2008-2011*. (skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia. 2013.

ICJR. 2012. *Konvensi Anti Penyiksaan*. (<http://icjr.or.id/konvensi-anti-penyiksaan/>). Diakses Tanggal 13 Nopember 2013 pukul 23:28 WITA.

[Indonesia ESC Rights Action Network](http://indonesia-escrights-net.blogspot.com/2009/08/mengenal-kovenan-internasional-tentang.html), *Mengenal Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekosob (ICESCR)*, (<http://indonesia-escrights-net.blogspot.com/2009/08/mengenal-kovenan-internasional-tentang.html>). Diakses Tanggal 13 Nopember 2013 pukul 22:48 WITA.

Irsan Koesparmono. *Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2007

Kadarudin. *Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka, dan Pengungsi*. Makassar: Jurnal pengembangan ilmu hukum "Gratia" Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Vol. VIII, Nomor 1 Edisi April 2012.

\_\_\_\_\_. *Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Menurut Konvensi 1951*. Makassar: Jurnal Hukum Internasional "Jurisdictionary", Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Vol. VI, Nomor 1 Edisi Juni 2010.

Lembar disposisi Direktorat Keamanan Diplomatik. *Illegal Migrant*. Direktorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri: Jakarta. 2010.

Lembar disposisi Direktur HAM dan Kemanusiaan. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Pengungsi*. Direktorat Kerjasama HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Jakarta. 2010.

Muhammad Chairul Kadar. *Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Prinsip Non-refoulment, Studi Kasus Rumah Detensi Imigrasi Makassar Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan*. (skripsi). Makassar: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2011.

Poltak Partogi Nainggolan. *Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara*. dalam <https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:iyc3KXryg6kJ:www.pdii.lipi.go.id/wp-content/uploads/2012/04/Masalah-negara-kepulauan-di-era-globalisasi.pdf+Poltak+Partogi+Nainggolan.pdf>. Diakses Tanggal 23 Maret 2014 pukul 13.20 WITA.

Yoyok Syahputra. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Keimigrasian menurut Undang-Undang RI*. (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2007.